Abstrak

Situs web sebagai media yang paling umum di gunakan untuk implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) belum sepenuhnya memberikan informasi yang di butuhkan oleh masyarakat dan belum ada cara mengukur kinerja KIP pada situs web. Dalam pengembangan alat ukur KIP, Undang-undang (UU) No.14 Tahun 2008 tentang KIP menjadi patokan dalam hal penentuan variabel informasi apa saja yang harus ada dibuka ke masyarakat dan mana yang tidak. Penentuan jenis informasi juga mengacu pada UU, hal itu dilakukan agar dalam pengukuran informasi pada situs web informasi-informasi tersebut dikelompokkan menurut jenisnya. Setiap informasi tentunya mempunyai isi yang beragam dan untuk mengukurnya diperlukan parameter serta penentuan menilainya, dalam hal ini penulis tidak hanya berpatokan pada UU KIP tapi juga pada penelitian terdahulu yang relevan. Pengembangan alat ukur KIP tidak luput dari tantangan-tantangan seperti, penentuan variabel dan jenis informasi yang harus merepresentasikan UU KIP. Objek validasi alat ukur KIP pada penelitian ini ialah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kukar memiliki total 110 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), 76 SKPD telah memiliki situs web guna menyebar luaskan informasi. Hasil pengukuran pada semua situs web yang aktif di Kukar, menunjukkan kinerja KIP masuk dalam kategori di bawah cukup karena hanya dua badan publik yang mempunyai informasi yang lengkap dan sesuai amanat UU.

Kata kunci

Alat ukur, KIP, Situs web, Kutai Kartanegara

Abstract

Websites as the most general media which are used for implementation of Openness Public Information(OPI) has not fully provide information which needed by the public and there is no way to measure the performance of the OPI on the website. In the development of OPI measurement tool, Law No.14 of 2008 about OPI become standard to establish variable information which have to be opened into public and which are not. To determine what kind of information are using law too as standard, It is done in order that when information measurement in web sites the information are grouped by the content. Every information must have various content and to measure it is needed parameter and determine score, in this case the author not only based in Law, but also in older research which are relevant. The development of OPI measurement has some challenge, establish the variable and type of information have to represent OPI Law. Measurement tool object validation in this research is Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Kukar has a total amount of 110 Regional Working Units (RWU), 76 of the RWU already has a web site to disseminate information. The measurement result to all active web sites in kukar, show that OPI performance is fall into the categories under enough because only two public ministry have complete information and as mandated by the law.

Keyword

Measurment tool, OPI, Website, Kutai Kartanegara